



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
KALURAHAN BANJARHARJO**

**PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN BANJARHARJO KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH BANJARHARJO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 13 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANJARHARJO**

- Menimbang:** a.bahwa tingkat kasus Covid-19 wilayah Kalurahan Banjarharjo sudah terkendali dengan memperhatikan Rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 Kalurahan Banjarharjo sehingga perlu dilakukan penyesuaian Pagu Anggaran 8% Dana Desa untuk penanganan Covid-19;
- b.bahwa Pemerintah Kalurahan harus menganggarkan pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama hasil transformasi Unit Pengelola Keuangan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banjarharjo tentang Perubahan Kalurahan Banjarharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :** 1.Undang Undang No 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan ruang sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 18 tahun 1951
- 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 tentang Hubungna Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentuakn Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Jogjakarta
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/.07/2021 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2020 tentang lurah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
21. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
29. Peraturan Desa Banjarharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarharjo Tahun 2019-2024
30. Peraturan Desa Banjarharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

31. Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banjarharjo Tahun 2022;
32. Peraturan Kalurahan Nomor 8 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan tahun 2022
33. Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 3 Tahun 2022;

Memperhatikan: 1. Surat Direktorat Jendral Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 148/PRI.02/III/2022 tentang Penyampaian Panduan teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Bersama Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/105 tanggal; 15 Juni 2022 perihal Penyusunan Pagu 8 % Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 dan Penganggaran Penyertaan modal BUM Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARHARJO

Dan

LURAH BANJARHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : perubahan kedua atas anggaran pendapatan dan belanja kalurahan nomor 13 tahun 2021 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2022

Pasal 1

Perubahan Kedua atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kal.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| a. semula | Rp 2.713.848.904 |
| b. bertambah | <u>Rp 1.305.524.428</u> |
| Jumlah pendapatan setelah peru | Rp 4.019.373.332 |

2. Belanja Kalurahan

| | |
|---|-----------------------|
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
| a. semula | Rp 1.668.682.444 |
| b. bertambah | <u>Rp 21.141.896</u> |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| a. semula | Rp 650.137.500 |
| b. bertambah | <u>Rp 493.378.500</u> |
| - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| a. semula | Rp 93.380.000 |
| b. bertambah | <u>Rp 265.185.000</u> |
| - Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| a. semula | Rp 40.140.000 |
| b. bertambah | <u>Rp 369.028.000</u> |
| - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | |
| a. semula | Rp 366.220.000 |
| b. bertambah | <u>Rp 186.564.900</u> |

Jumlah belanja setelah perub Rp 4.153.858.240

Surplus/(Defisit) setelah perub Rp 1.335.298.296

3. Pembiayaan Desa

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| A. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp 195.065.940 |
| b. Bertambah) | <u>Rp 28.568.968</u> |
| Jumlah penerimaan set perub | Rp 223.634.908 |
| B. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp 90.354.900 |
| b. berkurang | Rp 1.204.900 |
| Jumlah penerimaan set perub | Rp 89.150.000 |

Selisih Pembiayaan set. peru(A-B) Rp 134.484.908

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini berupa rincian struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan/atau keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik

Ditetapkan di : Banjarharjo

Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Lurah Banjarharjo



SUSANTO

Di undangkan di Banjarharjo

Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

CARIK



S U W A N D I

BERITA DAERAH KALURAHAN BANJARHARJO TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan dikirim kepada:

1. Bupati Kulon Progo
2. Kepala BKAD Kulon progo
3. Panewu Kalibawang
4. Ketua BPK
5. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
KALURAHAN BANJARHARJO**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARHARJO**

DAN

LURAH BANJARHARJO

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 9/PB/BPK/2022

NOMOR : 9/PB/X/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO NOMOR
13 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal LIMA bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Gedung Pertemuan Kalurahan Banjarharjo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo

MENYETUJUI

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kalurahan Banjarharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo

Ketua

Badan Permusyawaratan Kalurahan





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG**

Kapanewon Kulon Progo

Alamat : Jl. Sentolo-Klengan Km 22, Kalibawang, Kulon Progo Telp : (0274) 2521192
Website : <https://kalibawang.kulonprogo.kab.go.id>, Email : kalibawang@kulonprogo.kab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG
KABUPATEN KULONPROGO
Nomor : 70 / KPTS / X / 2022**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARHARJO KAPANEWON
KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PANEWU KALIBAWANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Ketiga Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjarharjo tentang Perubahan Ketiga Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalibawang
Pada tanggal : 25 Oktober 2022

Kapaluh Kalibawang



Heneng Nurcahya, S.P., M.M.
Pembina Tk.I, V/b
NIP. 19741118 199412 1 001

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJARHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|---|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PENDAPATAN | | | | 7 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | 108.645.351,00 | 110.552.351,00 | 1.906.000,00 |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | | 25.700.000,00 | 25.700.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | | 20.531.000,00 | 31.020.000,00 | 10.489.000,00 |
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | | 62.415.351,00 | 53.832.351,00 | (8.583.000,00) |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | | 2.605.202.553,00 | 3.906.510.981,00 | 1.301.308.428,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | | 1.185.532.000,00 | 1.249.349.000,00 | 63.817.000,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 128.574.603,00 | 136.066.031,00 | 8.491.428,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | 1.283.095.950,00 | 1.283.095.950,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | 0,00 | 1.238.000.000,00 | 1.238.000.000,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | 0,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| 4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | | 0,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.713.848.904,00 | 4.019.373.332,00 | 1.305.524.428,00 |
| 2. | BELANJA | | | | |
| 1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | 1.668.882.444,00 | 1.689.824.340,00 | 21.141.896,00 |
| 1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | 1.375.101.450,00 | 1.418.140.529,00 | 43.039.079,00 |
| 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | 45.297.000,00 | 45.297.000,00 | 0,00 |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|---|---------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai | | 45.257.000,00 | | 0,00 |
| 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | 906.353.000,00 | | (3.797.652,00) |
| 1.1.02 | Belanja Pegawai | | 906.353.000,00 | | (3.797.652,00) |
| 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | 45.820.212,00 | | 0,00 |
| 1.1.03 | Belanja Pegawai | | 45.820.212,00 | | 0,00 |
| 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK Honorarium PKPKD dan Pi | | 316.558.000,00 | | 26.536.731,00 |
| 1.1.04 | Belanja Pegawai | | 181.792.292,00 | | (3.290.828,00) |
| 1.1.04 | Belanja Barang dan Jasa | | 134.766.638,00 | | 29.827.659,00 |
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | | 46.550.000,00 | | 20.300.000,00 |
| 1.1.05 | Belanja Pegawai | | 46.550.000,00 | | 20.300.000,00 |
| 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan | | 14.521.500,00 | | 0,00 |
| 1.1.06 | Belanja Barang dan Jasa | | 14.521.500,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | | 33.015.500,00 | | 71.200.000,00 |
| 1.2.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | | 33.015.500,00 | | 8.200.000,00 |
| 1.2.02 | Belanja Barang dan Jasa | | 33.015.500,00 | | 8.200.000,00 |
| 1.2.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | | 0,00 | | 63.000.000,00 |
| 1.2.03 | Belanja Modal | | 0,00 | | 63.000.000,00 |
| 1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | 53.640.851,00 | | (38.081.851,00) |
| 1.3.01 | Pelayanan administratif umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelaya | | 11.506.351,00 | | 8.097.649,00 |
| 1.3.01 | Belanja Barang dan Jasa | | 11.506.351,00 | | 8.097.649,00 |
| 1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan | | 43.232.500,00 | | (43.232.500,00) |
| 1.3.02 | Belanja Barang dan Jasa | | 43.232.500,00 | | (43.232.500,00) |
| 1.3.05 | Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif | | 8.902.000,00 | | (2.947.000,00) |
| 1.3.05 | Belanja Barang dan Jasa | | 8.902.000,00 | | (2.947.000,00) |
| 1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | | 192.464.643,00 | | (63.215.332,00) |
| | | | | 129.249.311,00 | |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|--|---------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musodus reimbang warga dan la | | 20.550.000,00 | 8.300.000,00 | (12.250.000,00) |
| 1.4.02 | Belanja Barang dan Jasa | | 20.550.000,00 | 8.300.000,00 | (12.250.000,00) |
| 1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP,MDes/RK/Des dan lain-lain) | | 15.000.000,00 | 13.530.000,00 | (1.470.000,00) |
| 1.4.03 | Belanja Barang dan Jasa | | 15.000.000,00 | 13.530.000,00 | (1.470.000,00) |
| 1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L | | 23.845.643,00 | 22.944.711,00 | (900.932,00) |
| 1.4.04 | Belanja Barang dan Jasa | | 23.845.643,00 | 22.944.711,00 | (900.932,00) |
| 1.4.05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | | 66.719.000,00 | 68.094.600,00 | 2.375.600,00 |
| 1.4.05 | Belanja Barang dan Jasa | | 13.019.000,00 | 13.019.000,00 | 0,00 |
| 1.4.05 | Belanja Modal | | 53.700.000,00 | 55.075.600,00 | 2.375.600,00 |
| 1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | | 66.350.000,00 | 15.380.000,00 | (50.970.000,00) |
| 1.4.08 | Belanja Barang dan Jasa | | 19.230.000,00 | 0,00 | (19.230.000,00) |
| 1.4.08 | Belanja Modal | | 47.120.000,00 | 15.380.000,00 | (31.740.000,00) |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanian | | 4.460.000,00 | 12.660.000,00 | 8.200.000,00 |
| 1.5.02 | Administrasi Pertanian (Pendataan Tanah dan Pemberian Registrasi Ap | | 2.190.000,00 | 10.390.000,00 | 8.200.000,00 |
| 1.5.02 | Belanja Barang dan Jasa | | 2.190.000,00 | 10.390.000,00 | 8.200.000,00 |
| 1.5.06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 |
| 1.5.06 | Belanja Barang dan Jasa | | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | 650.137.500,00 | 1.143.516.000,00 | 493.378.500,00 |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | | 152.175.000,00 | 152.310.000,00 | 135.000,00 |
| 2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | | 152.175.000,00 | 152.310.000,00 | 135.000,00 |
| 2.1.01 | Belanja Pegawai | | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 2.1.01 | Belanja Barang dan Jasa | | 152.175.000,00 | 148.710.000,00 | (3.465.000,00) |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | | 258.516.000,00 | 243.844.000,00 | (14.672.000,00) |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L | | 108.960.000,00 | 108.960.000,00 | 0,00 |
| 2.2.02 | Belanja Barang dan Jasa | | 108.960.000,00 | 108.960.000,00 | 0,00 |
| 2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke | | 39.156.000,00 | 41.784.000,00 | 2.628.000,00 |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|--------|---------------|---------|--------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.03 | 5.2. | | | | |
| 2.2.04 | 5.2. | | | | |
| 2.2.04 | 5.2. | | | | |
| 2.3 | | | | | |
| 2.3.11 | 5.3. | | | | |
| 2.3.12 | 5.3. | | | | |
| 2.3.12 | 5.3. | | | | |
| 2.4 | | | | | |
| 2.4.17 | 5.3. | | | | |
| 2.4.17 | 5.3. | | | | |
| 2.8 | | | | | |
| 2.8.02 | 5.3. | | | | |
| 2.8.02 | 5.3. | | | | |
| 3. | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.2.01 | 5.2. | | | | |
| 3.2.01 | 5.2. | | | | |
| 3.2.03 | 5.2. | | | | |
| 3.2.03 | 5.2. | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 3.3.01 | 5.2. | | | | |
| 3.3.01 | 5.2. | | | | |
| 3.3.06 | 5.2. | | | | |
| 3.3.06 | 5.2. | | | | |
| 3.4 | | | | | |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|---|---------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 3.4.02 | Belanja Barang dan Jasa | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 3.4.03 | Pembinaan PKK | | 12.250.000,00 | 3.000.000,00 | (9.250.000,00) |
| 3.4.03 | Belanja Barang dan Jasa | | 12.250.000,00 | 3.000.000,00 | (9.250.000,00) |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | 40.140.000,00 | 409.168.000,00 | 369.028.000,00 |
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | 0,00 | 143.560.000,00 | 143.560.000,00 |
| 4.1.06 | Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Desa | | 0,00 | 143.560.000,00 | 143.560.000,00 |
| 4.1.06 | Belanja Barang dan Jasa | | 0,00 | 143.560.000,00 | 143.560.000,00 |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga | | 9.080.000,00 | 0,00 | (9.080.000,00) |
| 4.4.01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | | 9.080.000,00 | 0,00 | (9.080.000,00) |
| 4.4.01 | Belanja Barang dan Jasa | | 9.080.000,00 | 0,00 | (9.080.000,00) |
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | 21.060.000,00 | 265.608.000,00 | 234.548.000,00 |
| 4.7.03 | Pengembangan Industri kecil level Desa | | 23.860.000,00 | 24.465.000,00 | 605.000,00 |
| 4.7.03 | Belanja Barang dan Jasa | | 23.860.000,00 | 24.465.000,00 | 605.000,00 |
| 4.7.04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi | | 7.200.000,00 | 241.143.000,00 | 233.943.000,00 |
| 4.7.04 | Belanja Barang dan Jasa | | 7.200.000,00 | 241.143.000,00 | 233.943.000,00 |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | | 366.220.000,00 | 552.784.900,00 | 186.564.900,00 |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | 6.220.000,00 | 52.384.900,00 | 46.164.900,00 |
| 5.1.00 | Penanggulangan Bencana | | 6.220.000,00 | 52.384.900,00 | 46.164.900,00 |
| 5.1.00 | Belanja Tidak Terduga | | 6.220.000,00 | 52.384.900,00 | 46.164.900,00 |
| 5.3 | Sub Bidang Keadan Mendesak | | 360.000.000,00 | 500.400.000,00 | 140.400.000,00 |
| 5.3.00 | Keadan Mendesak | | 360.000.000,00 | 500.400.000,00 | 140.400.000,00 |
| 5.3.00 | Belanja Tidak Terduga | | 360.000.000,00 | 500.400.000,00 | 140.400.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | | 2.818.559.944,00 | 4.153.858.240,00 | 1.335.298.296,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | | (104.711.940,00) | (134.484.908,00) | (29.773.868,00) |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|---|---------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2. | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | | 195.065.940,00 | 223.634.908,00 | 23.568.968,00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | | 195.065.940,00 | 223.634.908,00 | 28.569.968,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | | 90.354.900,00 | 89.150.000,00 | (1.204.900,00) |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | | 90.354.900,00 | 89.150.000,00 | (1.204.900,00) |
| | PEMBIAYAAN NETTC | | 104.711.040,00 | 134.484.908,00 | 27.364.068,00 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KABUPATEN KULON PROGLIO, 23 December 2022

